

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Bari. 2008, *Perlembagaan Malaysia: Teori Parktis*, Arah Publication, Shal Alam.
- Abdul Ghofar. 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abu Bakar. 2010, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar Ruz Media, Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Soema. 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi. 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya.
- Adami Chazawi. 2011, *Kejahatan Penghinaan*, PT. Rajagrafindo Persada, Bandung.
- Adnan Buyung Nasution. 2003, *Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Inonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Afan Gaffar. 2001, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2001, *Membangun Negara Hukum*, Citra Adiya, Bandung.
- Andi Hamzah, A. 1989, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko. 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Berat Indonesia Timor Leste*, Grasindo, Jakarta.
- Anwar Arifin. 2015, *Perspektif Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar Y dan Adang. 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana – Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta.
- Arif Gosita. 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Akademia Persindo.

Asiah Sarji. 2003, *Wawasan Malaysia Memahami Konsep, Implikasi dan Cabaran Terjemahan*, Berhad, Malaysia.

Asmanov Sukri. 2009, *Kebijakan Pengaturan HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Sumatera Utara.

Aspadia. 2001, *Menggugat Sistem Peradilan di Indonesia*, Lekshi, Surabaya.

AZ. Abidin Farid. 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jambatan, Jakarta.

AZ. Abidin. 1983, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

AZ. Abidin. 2007, *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP*. ELSAM, Jakarta.

Bagir Manan. 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH-UII Press, Yogyakarta.

Bagir Manan. 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara Unpad, Bandung.

Bahder Johan Nasution. 2010, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang H. Poernomo. 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghahlia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawari Arief. 2007, *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

Barda Nawawi Arief. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cipta Aditya, Bandung.

Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Adidaya Bakhti, Bandung.

Barda Nawawi Arief. 2009, *Tujuan Dan Pedoman Pemidaan Persfektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara*, Universitas Diponogoro, Semarang.

Barda Nawawi Arief. 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief. 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2011, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prananda Media, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2004, *Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Carl J. Friedrich. 1963, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Charter, G. M., & Herz, J. 1982, *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini*, Gramedia, Jakarta.
- Dadang Ansori. 2017, *Analisis Wacana: Teori Aplikasi dan Pembelajaran*, UPI Press, Bandung.
- Dahlan Thaib. 2002, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- Daniel S. Lev. 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Dayanto. 2001, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pergulatan Paradigmatik dan Kritik Realitas*, Kencana, Jakarta.
- Didi Nazmi. 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.
- DJ Galligan. 1996, *Due Process and Fair Procedure: A Study of Administrative Procedures*, Clarendon Press, Oxford.
- Dody Setiawan. 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*, Intelegensia Media, Malang.
- Donny Gahril Adian. 2010, *Demokrasi Substansial*, Koekoesan Depok, Depok.
- Dwidja Priyatno. 2010, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Eddyono, S. W., Sriyana, & Wagiman, W. 2012, *Analisis situasi penerapan hukum penghinaan Di Indonesia*.
- Edmon Makarim. 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.

- EY. Kanter. 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- F Usfa. 2004, *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Press, Malang.
- Firmansyah Arifin. 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.
- FM Suseno. 1997, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fockema Andreae. 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Diterjemahkan oleh Saleh Atwinata. Bina Cipta, Jakarta.
- Frans Maramis. 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Gunawan Setiardja. 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadjon, P. M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hafid Abbas. 2005, *Hak Asasi Manusia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hakim, L. 1999, *Kajian Kebijakan Publik*.
- Hans Kelsen. 1961, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Suwirjadi, Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Hans Kelsen. 1995, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empiris Deskriptif*, Alih Bahasa Drs. Soemardi, Rimdi Press, Jakarta.
- Hamdan. 1997, *Politik Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kita Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Harman, B. K. 2004, *Peranan Mahkamah Dalam Menwujudkan Reformasi Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hoefnagels. 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Academic, Deventer.
- Hook, S. 1980, *The Politics of Policy Implementation*. Martin 'Espress, New York.
- Hotma P. Sibuea. 2014, *Asas Negara Hukum dan Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta.
- I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Konstitusional: Upaya hukum dalam Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Disertasi Program Doktor Universitas Indonesia.

- Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- ICJR. 2012, *Analisa Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia*, Institute Criminal for Justice Reform, Jakarta.
- Ignatius Haryanto. 2003, *Kejahatan Negara*, Elsam, Jakarta.
- Ilhami Bisri. 2011, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irjen DPM Sitompul. 2002, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Jack Donelly. 1973, *Universal Human Rights in Theory and Practise*, Cornell University Press, New York.
- Jan Rammelingk. 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jan Remmelink. 2002, *Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari KUHP*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Jan Remmelink. 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padananya Dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jazim Hamadi. 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqi. 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2002, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie. 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- John Arthur dan William Shaw. 1984, *Reading In The Philosophy of Law*, Pretencie Hall, New Jersey.
- John Kennedy. 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- John M. Echols. 2002, *An English-Indonesian Dictionary* (27th ed.), PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.
- John Rawls. 2006, *A Theory of Justice*, Dikutip oleh LG Saraswati, Filsafat UI, Jakarta.
- Juniarto. 1960, *Negara Hukum*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Kalaen. 1999, *Demokrasi Politik Kerakyatan*, Rosada, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

- Kees Bertens. 2004,*Etika*, Gramedia, Jakarta.
- Lamintang. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang. 1987,*Delik-Delik Kusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang. 2014,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 1975,*The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lilik Mulyadi. 2008,*Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mansyhur Effendi. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan International*, Dahlia Indonesia, Jakarta.
- M. Alfian Alfian. 2009, *Demokrasi Pilihlah Aku Warna-Warni Politik Kita*, Trans Publishing, Malang.
- M. Cherif Bassiouni. 1978,*Substantive Criminal Law*, Charles C Thomas Pub Ltd, Illinois.
- M. Hamdan. 1997,*Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Nata Saputra. 1988,*Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Mahfud M. D. 2008,*Criminal Policy: Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marc Ancel. 1965,*Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge Kegan Paul, London.
- Maria S. W. Sumardjono. 2008,*Pengkajian atas Asas-Asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Maria S.W Sumardjono. 1989, *Pedoman Pembuat Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Marpaung. 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Marzuki S. 2013, *Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial.
- Miriam Budiardjo. 2007,*Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

- Moch Anwar. 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP Bagian ke II*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Mochtar Lubis. 1997, *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya: Seri 2: Korupsi dan Ekonomi, Pendidikan dan Generasi Muda, Hukum, ABRI*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moegni Djojodirjo. 2008, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno. 1984, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moelyatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Darudin. 2013, *Islam Demokrasi Dalam Kehidupan Bernegara, Dekonstruksi dan Gerakan. Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mokhamad Najih. 2014, *Politik Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang.
- Mudzakir. 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta.
- Muhammad Yamin. 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi. 1997, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang.
- Muladi. 2002, *Politik Hukum Dalam Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibi Center, Jakarta.
- Muladi. 2010, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurudin. 2017, *Pengantar Komunikasi Masa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurul Qamar. 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- O. C. Kaligis. 2010, *Koin Peduli Prita Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta.

- Oemar Senoadji. 1991,*Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Profesi Wartawan*, Erlangga, Jakarta.
- P. Hadjon. 1985, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Philipus Hadjon. 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Prasetyo, T. 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Prodjodikoro.1974, *Tindak -Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Pujiyono. 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana Kriminalisasi Atas Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka. 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2002,*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika, Bandung.
- Rafael Raga Maran. 2014,*Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ramdlon Naning. 1983,*Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*, Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Randhi, T. M. 2007,*Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Reksodiputro. 1994,*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminal Universitas Indonesia, Jakarta.
- Reksodiputro. 1994,*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan pengadilan Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Reksodiputro. 2009, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982,*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atma Sasmita. 2004,*Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1996,*Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.



- Roni Hanitijo. 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pers, Malang.
- Sahid Gatara. 2008, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Santoso, I., & Simanjuntak, T. 1998, *Politik Pembebasan Parpol*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Santoso. 2005, *Ensiklopedia Politik*, Locakaraka, Jakarta.
- Santoso. 2020, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2011, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. *Indonesia Menginginkan Penegakan Hukum Progresif*, Dalam Suparman Marzuki, Pengadilan HAM di Indonesia Melengangkan Impunity, Erlangga, Jakarta.
- Sidik Sunaryo. 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Smith, R. K. 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soeharjo. 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Soemantri. 1985, *Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara*, Dalam Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, S. 1995, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto. 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto. 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, S. 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Sunaryati Hartono. 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Suprpto. 2001, *Moralitas Politik Dan Pemerintahan Yang Bersih*, Republika, Jakarta.
- Syaiful Bakhri. 2010, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta.
- Syaiful Bakhri. 2014, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pustaka Belajar, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Tjipta Lesmana. 2005, *Pencemaran Nama Baik*, Erwin Press, Jakarta.
- Todung M. Lubis. 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Togat. 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wisnubroto. 1999, *Kebijakan Hukum Pidana*, Atmajaya, Yogyakarta.
- Zulhasril Nasir. 1996. *Kebebasan Pers Sebagai Realitas Subjektif; Studi Kasus Pembredalan Tempo* (Unpublished master's thesis), Universitas Indonesia, Jakarta.

## **B. Jurnal/Majalah Ilmiah**

- Butje Tampi. 2016, Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume (3) Nomor 9.
- Dahlan M.A. 1997, Sikap Pejabat Terhadap Kritik, *Jurnal Prisma*, Volume 6 Nomor 10.
- Galuh Chandra Purnamasari. 2017, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judisial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Harjono. 2009, Negara Hukum, Demokrasi dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum*, Volume II Nomor III.
- Harjono. 2010, Negara Hukum, Demokrasi dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Universitas Jambi, Program Magister Hukum*, Volume (2).
- Jimli Asshiddiqie. 2008, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Bahan Disampaikan Pada *Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras*, Jakarta.

- Marcus, E. T. 1983, Group defamation and individual actions, A new look at an old rule, *California Law Review*, 71(5), 1532. doi:10.2307/3480150.
- Marwadiyanto Nasution. 2011, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, *Jurnal HAM*.
- Nugroho, H. 2012, Demokrasi Sebagai Bentuk Konseptual Untuk Memahami Sosial Politik di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume (1).
- Sudarto. 1979, Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, *Jurnal Hukum dan Keadilan* Nomor 5 Edisi Januari-Februari.
- Susanto A.S. Makna Dan Fungsi Kritik Sosial Dalam Masyarakat Dan Negara. *Jurnal Prisma*, Volume (6).
- Thalhah. 2009, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, *Jurnal Hukum*, Volume (16).
- Usman, Harmonisasi Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP, *Jurnal Surya Keadilan*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 2, No. 2, November 2018.
- Widiarto, A. E. 2015, Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume (12).
- Widodo Eddiyono. 2007, Human Rights Watch, Kembali Ke Orde Baru Tahana Politik di bawah Kepemimpinan Megawati, 2003, Memutus Jerat Pasal-Pasal Sang Ratu, *Jurnal Konstitusi*, Fall. 4, No. 1.
- Yurika Oentoro. 2012, Representasi Figur Burung Garuda Yang Digunakan Sebagai Lambang Negara. *Jurnal Nirmana*, Volume (14).
- Zakqiu Rahman. Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP, *Journal Rechts Finding Online*, Media Pembinaan Hukum Nasional.

### **C. Makalah Seminar/Diskusi/Simposium/Lokakarya**

- Amirul Hadi. 2003, “Damai dan Hak Asasi Manusia”, Makalah, Seminar Internasional Peace and Human Rights in Religion History, Medan, 13-14 Desember.
- Aswanto. 2005, “Hak Asasi Manusia” (Konsep Filosofis, Historis dan Yuridis), Makalah, Training HAM oleh LBH Makassar Kerjasama Tifa, Makassar, 14-16 April.
- Atmakusumah Astraadmadja, Dekriminalisasi Pekerjaan Pers, Makalah, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996, “Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Makalah Seminar Nasional Pedekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang.

Dalam Acara Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang digelar di Cikini, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2015.

Indriyanto Seno Adji, Dalam Seminar Nasional UI, Jakarta, 2014.

Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Delik-Delik Penghinaan Terhadap Pejabat Negara dan Simbol Negara, Lihat juga pernyataan Muladi dalam beberapa artikelnya menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 265 RUU KUHP mesti tetap ada. Panitia penyusun RUU telah mengadakan rapat pada tanggal 28 Januari 2008, Tim penyusun melakukan revisi atas penjelasan RUU KUHP.

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Konsentrasi Hukum Pidana, Tahun akademik 2019-2020.

Mardjono Reksodiputro, Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUU KUHP, Disampaikan Dalam Pertemuan Komnas HAM, 24 November 2006.

Mudzakkir, Pendapat Ahli Dalam Sidang Perkara 6/PPU-V/2007 Tentang Judicial Review Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Rangkuman Tulisan Emiliana Krisnawati, Problematic Law Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia.

Roeslan Saleh. 1996, "Melihat Ke Belakang dan Menatap Ke Depan Dengan Meperkokoh Dasar Hukum Yang Berlaku Hingga Kini Di Waktu Yang Akan Datang", Makalah, Seminar Kepolisian, Jakarta.

Satya Arinanti, "Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia", Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.

SR. Sianturi, Seminar di Gedung Joeang Jakarta.

Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Sinkronisasi Ketentuan Perundangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum, 2001.

Usfunan Yohanes, Kodifikasi RUU KUHP Dari Perspektif Legislatif Drafting, Disampaikan Dalam Seminar yang Diselenggarakan Oleh Komisi III DPR RI Berkaitan Dengan Pembahasan RUU KUHP, Jakarta, 23-24 Agustus 2016.

Zainal Abidin. 2010, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangan", Makalah, Kursus HAM untuk Pengacara ke XIV, Jakarta, 27 Oktober.

#### **D. Internet**

Anggara Suwahju. 2018, 9 Februari, Asal Muasal Pasal Penghinaan Presiden dan Problematikanya. Diambil dari

Elsam. 2015, September 4, Pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat Yang inkonstitusional: Amicus curiae (komentar tertulis) diajukan oleh: Elsam, icjr, imdln, PBHI, Dan YLBHI. Diambil dari <https://elsam.or.id/pidana-penghinaan-adalah-pembatasan-kemerdekaan-berpendapat-yang-inkonstitusional-amicus-curiae-komentar-tertulis-diajukan-oleh-elsam-icjr-imdln-pbhi-dan-ylbhi/>

Faiz, F. M. 2006, December 7, *Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden*. Diambil dari <https://panmohamadfaiz.com/2006/12/07/pencabutan-pasal-penghinaan-presiden/>

<https://beritagar.id/artikel/telatah/menelisik-rkuhp-asal-muasal-pasal-penghinaan-presiden-dan-problematikanya>

<https://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/Chronicle/Kompas/May25/habi01.htm>

Institute for Criminal Justice Reform. 2012, December 2, Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia. Diambil dari <https://icjr.or.id/analisis-situasi-penerapan-hukum-penghinaan-di-indonesia/>

Kompas Online. 1998, May 25. *Habibie akan Bebaskan Bintang dan Pakpahan*. Diambil dari

Prasetyo, R. 2006, October 19. *Mahasiswa Penghina Presiden Dituntut Enam Bulan*. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/86416/mahasiswa-penghina-presiden-dituntut-enam-bulan>

Saparie, G. 2015, August 11. *Gagasan : Pasal Penghinaan terhadap Presiden*. Diambil dari <https://www.solopos.com/gagasan-pasal-penghinaan-terhadap-presiden-631927>.

## **E. Undang-Undang**

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD NKRI Tahun 1945).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

## **F. Putusan Pengadilan**

Egi suzana, Pendapat dihadapan Mahkamah Konstitusi.

Noyon Langeemijer, *Het Wetboek* halaman I, 566-557 dikutip Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 dan Nomor 022/PUU-IV/2006.

Pernyataan Mardjono Redsodiputro Dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Tim Redaksi Tatanusa, Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998, Jakarta, 1999.